



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2014**

**Disampaikan :**

**PADA RAPAT PARIPURNA  
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

***Samarinda, 10 Juni 2015***

---

***Bismillahir Rahmannir Rahim,***

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***

***Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,***

**Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,**

**Yth. Rekan-rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,**

**Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga dan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,**

**Yth. Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Provinsi Kalimantan Timur**

***serta rekan-rekan Pers dan hadirin yang saya hormati,***

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti

Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) dan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 pasal 31.

***Sidang Dewan Yang terhormat,***

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan tahun 2014, ***merupakan kewajiban konstitusional dan laporan perkembangan tahunan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kami selaku Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014*** yang harus disampaikan kepada anggota DPRD yang terhormat.

Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, yang merupakan tahun transisi antara berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode Tahun 2009-2013 serta awal Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018.

Pemerintah Daerah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan melalui program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahun anggaran 2014 dilaksanakan sebelum RPJMN Tahun 2015-2019 disahkan, namun kebijakan pembangunan Kalimantan Timur telah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan visi misi dan agenda Nawacita Presiden RI **H. Joko Widodo** dan Wakil Presiden RI **H.M. Jusuf Kalla** yang diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Percepatan transformasi ekonomi;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
8. Pengembangan agribisnis;
9. Peningkatan produksi pangan;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyampaikan gambaran objektif, langkah-langkah yang telah ditempuh, pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

***Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,***

Sebelum saya menyampaikan materi pokok ***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2014***, terlebih dahulu pada ***BAGIAN PERTAMA*** saya akan menyampaikan secara ringkas kondisi makro perkembangan sosial ekonomi Kalimantan Timur.

Visi Kaltim Maju 2018 “**Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan**” merupakan semangat untuk membangun masa depan ekonomi daerah Kalimantan Timur yang berbasis sumberdaya alam terbarukan, tidak tergantung atas migas dan batubara yang di awal RPJMD 2013-2018 mendominasi hingga 61,30% dari total PDRB.

PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 mencapai Rp 579,01 Trilyun bertambah Rp 7,7 Trilyun dibanding tahun 2013 sebesar Rp 571,31 Trilyun namun laju pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 2,02% turun sebesar 0,70% dibanding tahun 2013 sebesar 2,72%. Laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 7,66% relatif lebih rendah dari Laju inflasi Nasional sebesar 8,36%.

Sejalan dengan pembangunan Nasional, kerangka pembangunan Provinsi Kalimantan Timur menitikberatkan pada upaya membangun fundamental ekonomi melalui percepatan pembangunan kawasan industri yang berorientasi pada nilai tambah dan ekspor non-migas dengan pendekatan klaster industri.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen pada lima Misi yang sekaligus menjadi agenda utama pembangunan, yaitu;

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Sepuluh isu strategis pembangunan yang dihadapi Kalimantan Timur saat ini :

1. Pemekaran Kalimantan Utara;
2. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca;
3. Pengarusutamaan Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan;
4. Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan;

5. Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan;
6. Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi;
7. Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Ijin Eksploitasi;
8. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan;
9. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDG's*);
10. Pencapaian Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

***Sidang Dewan Yang terhormat,***

***Pada BAGIAN KEDUA ini*** perkenankan saya menyampaikan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD tahun 2014 yang telah selesai diaudit oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur, ***dengan urutan sebagai berikut :***

**1. Pendapatan**

Pada tahun 2014 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 11,19 Trilyun dengan realisasi mencapai Rp 11,29 Trilyun atau mencapai target 100,83%. Realisasi pendapatan sebesar Rp. 11,29 trilyun ini, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 6,66 Trilyun dan Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp 4,25 Trilyun.

Pemerintah Provinsi berupaya membangun kemandirian fiskal melalui terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara Nasional, PAD Kalimantan Timur menempati urutan ketiga tertinggi setelah DKI dan Jawa Timur. Kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 masih didominasi 66,10% dari dana perimbangan, sementara PAD baru mencapai 33,79%, dan pada tahun 2014 PAD telah mencapai 52,83% lebih besar dari dana perimbangan 47,17%, hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah menuju kepada kemandirian fiskal.

## **2. Belanja Daerah**

Pada Tahun 2014 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp 12,21 Trilyun terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6,59 Trilyun dan Belanja Langsung Rp 5,61 Trilyun.

Dilihat dari realisasi Belanja Tidak Langsung, belanja pegawai pada tahun 2014 sebesar Rp 1,02 Trilyun meningkat dibandingkan belanja pegawai tahun 2013 Rp 933 milyar. Kenaikan tersebut karena regulasi pemerintah terhadap kenaikan gaji pegawai serta penambahan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung selain belanja pegawai terdiri dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan kepada Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga dengan total Rp 5,57 Trilyun.

Dilihat dari realisasi Belanja Langsung, belanja pegawai pada tahun 2013 sebesar Rp 568 Milyar menjadi Rp 494 Milyar pada tahun 2014 atau menurun sebesar 13,03 %. Demikian pula terhadap Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar 12,33% dari Rp 2,46 Trilyun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 2,15 Trilyun pada tahun 2014. Sedangkan belanja modal menurun sebesar 39,43% dari Rp 3,65 Trilyun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 2,21 Trilyun pada tahun 2014.

Berikut ini saya juga akan menjelaskan berkenaan dengan Neraca Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun stakeholders dalam menilai kinerja Pemerintah.

Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 total nilai Aset adalah sebesar Rp. 30,08 Trilyun , dengan Kewajiban sebesar Rp. 913,79 milyar yang berarti posisi

Ekuitas Dana atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp.29,17 Trilyun.

Perkembangan atau perubahan mengenai masing-masing pos dalam neraca per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Aset**

Total nilai asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.30,08 Trilyun terdiri dari Aset Lancar Rp.3,51 Trilyun, Investasi Jangka Panjang Rp. 2,17 Trilyun dan Aset Tetap senilai Rp.24,22 trilyun serta aktiva lainnya senilai Rp 174 milyar. Dibandingkan total nilai aset per 31 Desember 2013 sebesar Rp 27,64 trilyun, berarti total aset 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp2,45 Trilyun atau 8,84 %. Peningkatan ini disebabkan antara lain penambahan atas nilai aset tanah dan nilai jalan dan jaringan.

**b. Kewajiban**

Kewajiban adalah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 913,79 milyar, terdiri dari Pendapatan Diterima dimuka Rp 2,75 Trilyun, Utang pada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 802,17 milyar serta utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 108,86 milyar.

**c. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana sebesar Rp 29,17 Trilyun merupakan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2014. Dibandingkan dengan ekuitas dana tahun 2013 yang berjumlah Rp 27,01 Trilyun, berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 2,16 Trilyun atau 26,90%. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan nilai asset tetap sebagaimana telah disampaikan.

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Hadirin yang berbahagia,***

***BAGIAN KETIGA***, selanjutnya saya sampaikan ***pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur*** dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan ***Lima Misi Pembangunan*** meliputi **Urusan Wajib** dan **Urusan Pilihan** yaitu :

**MISI PERTAMA,**

***Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi***

Dalam misi pertama ini pembangunan dilaksanakan untuk mencapai satu tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas SDM Kaltim” dengan lima sasaran yaitu (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Meningkatkan Angka Melek Huruf; (3) Meningkatnya Rata-Rata lama Sekolah; (4) Meningkatnya Angka Harapan Hidup; dan (5) Meningkatnya Pendapatan Perkapita.

Capaian pembangunan sumber daya manusia sangat menggembirakan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada tahun 2012 adalah 76,71 atau peringkat ke 5 secara nasional menjadi 77,33 di tahun 2013 atau naik peringkat ke 4 secara nasional.

Upaya pencapaian target Misi Pertama Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi ini melalui upaya pencapaian Prioritas 1; Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Prioritas 2; Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Prioritas 5; Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Indikator makro untuk bidang Pendidikan yang merupakan salah satu komposit pembentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah Angka melek huruf yang mencapai 98,64% melebihi target tahun 2014 sebesar 98,40%, dan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,6 tahun dibawah target 10 tahun



pada tahun 2014. Walaupun Rata-rata Lama Sekolah belum mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun 2013 yaitu 9,39 tahun.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian **Prioritas Pembangunan 1**; Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan antara lain :

1. Pembangunan Gedung Sekolah unggulan, SD dan SMP Terpadu, SMA/SMK Unggulan.
2. Pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang;
3. Dukungan pembangunan ITK di Balikpapan melalui penyediaan lahan telah mencapai 118 Ha dari 300 Ha yang direncanakan;
4. Peningkatan kualifikasi Guru ke jenjang tingkat pendidikan setara S1/D4 ;
5. Pembangunan Gedung Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI);
6. Pembangunan *Education Centre*;
7. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, melalui pembelajaran keaksaraan tingkat dasar dan lanjutan;
8. Pemasyarakatan Minat Baca melalui pengembangan Jaringan perpustakaan digital.

Terkait dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur menerima penghargaan KONI Award atas dedikasinya di bidang pembangunan olahraga dari KONI Pusat.

Capaian pembangunan sumber daya manusia selanjutnya untuk bidang kesehatan ditunjukkan dengan angka harapan hidup yang telah mencapai 71,78 tahun melebihi dari target 71,5 tahun. Kenaikan angka harapan hidup di Kalimantan Timur tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam upaya pencapaian **Prioritas Pembangunan 2**; Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, antara lain :

1. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Rujukan di RSUD A.W. Sjahranie Samarinda dan Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, serta Penyelesaian Pembangunan RSUD Tarakan;
2. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pengembangan Puskesmas 24 Jam dan Pembangunan Rumah Sakit Pratama untuk pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dan pada lokasi yang jauh dari jangkauan pelayanan rumah sakit;
3. Pemberian jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesprov) serta penanggulangan penyakit menular.

Capaian pembangunan sumber daya manusia lainnya adalah meningkatnya pendapatan per kapita mencapai Rp 47,52 juta yang melebihi dari target Rp 46,65 juta. Kenaikan pendapatan per kapita tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pelaksanaan **Prioritas Pembangunan 5;** Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkorelasi langsung terhadap pendapatan masyarakat seperti :

- Peningkatan standar Upah Minimum Regional (UMR) dari Rp 1.752.073,- di tahun 2013 menjadi Rp 1.886.315,- di tahun 2014 pada sektor ketenagakerjaan;
- Mempermudah akses perbankan dan memberikan jaminan kredit tanpa agunan bagi usaha mikro kecil dan menengah pada sektor riil.

## **MISI KEDUA**

***Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan***

Misi kedua ini menekankan pada 2 (dua) tujuan yaitu :

- Tujuan 1, *“Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat”* dengan sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran;
- Tujuan 2, *“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”* dengan sasaran meningkatnya daya beli masyarakat, menurunnya indeks gini,

meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dan tercapainya swasembada beras.

Upaya pencapaian Tujuan 1 dilaksanakan melalui Prioritas 3; Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Prioritas 4; Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Capaian indikator pembangunan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan yang ditargetkan 6% dalam realisasinya mencapai 6,42%. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat pergerakan inflasi yang mencapai 7,66% dan adanya migrasi penduduk dari luar daerah yang tidak memiliki keterampilan kerja.

Berbagai upaya telah dilakukan melalui **Prioritas Pembangunan 3**; Percepatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :

1. Fasilitasi Penyaluran Raskin;
2. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
3. Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
4. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa;
5. Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan;
6. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin;
7. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin;
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
9. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
10. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
11. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan;
12. Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Upaya penurunan pengangguran menunjukan hasil yang menggembirakan. hal ini ditandai dengan angka pengangguran telah mencapai 7,54% melebihi dari target 8%.

Berbagai upaya juga telah dilakukan melalui **Prioritas Pembangunan**

**4; Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**, antara lain :

1. Pengembangan Balai Latihan Kerja;
2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
3. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
4. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan;
5. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya;
7. Informasi Bursa Tenaga Kerja;
8. Pengembangan klaster bisnis untuk UMKM;
9. Penciptaan Calon Wirausahawan Baru pada sektor riil;
10. Pelatihan Kecakapan Hidup bagi pemuda putus sekolah;
11. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Peningkatan Fungsi-fungsi Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan;
13. Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pencapaian Tujuan 2 dilaksanakan melalui : Prioritas pembangunan 5; Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Prioritas pembangunan 6; Transformasi Ekonomi, Prioritas pembangunan 7; Pengembangan Agribisnis; Prioritas pembangunan 8; Peningkatan Produksi Pangan, dan Prioritas Pembangunan 9; Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Ramah Lingkungan.

Capaian indikator sasaran daya beli masyarakat diindikasikan oleh indikator paritas daya beli masyarakat. Paritas daya beli masyarakat Kalimantan Timur tahun 2013 mencapai Rp 653.700,-. Tahun 2014

ditargetkan nilai Paritas Daya Beli Kalimantan Timur sebesar Rp 698.622,- namun belum dapat di evaluasi karena BPS selaku institusi yang berkompeten dan memiliki kewenangan belum mempublikasikan capaian indikator dimaksud untuk tahun 2014.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui **Prioritas Pembangunan 5**, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang terdiri dari : Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha, Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, dan Kerjasama Kontak Dagang. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Prioritas Pembangunan 5 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan adalah Indikator Indeks Gini. Capaian Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebesar 0,334. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan per kapita di Kalimantan Timur lebih baik jika dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional sebesar 0,413.

Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi hijau, dapat diukur dengan menganalisa apakah pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi dengan migas. Pertumbuhan ekonomi Kaltim jika dihitung berdasarkan PDRB Tanpa Migas pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 4,02%. Walaupun angka pertumbuhan ini lebih rendah jika dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,77% namun masih berada dalam target capaian tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 5,5%-6,3%.

Besaran PDRB Kalimantan Timur Dengan Migas atas dasar harga berlaku tahun 2014 tercatat sebesar Rp 579,01 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp 571,31 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kaltim (dengan migas) pada tahun 2014 sebesar 2,02%, lebih rendah dibanding tahun 2013 yang tumbuh 2,72%. Namun angka pertumbuhan tersebut masih berada dalam target capaian tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 2,2%-3,2%.

Selanjutnya besaran PDRB Perkapita Kalimantan Timur tahun 2014 tercatat sebesar Rp 145,86 triliun. Walaupun lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 147,59 triliun, namun menempati peringkat tertinggi Kedua nasional. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional mengalami perlambatan dikarenakan penurunan kinerja ekspor dan tekanan mata uang Dolar Amerika terhadap Rupiah.

Walaupun demikian, upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas masih berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi investasi yang masuk ke Kalimantan Timur masih di dominasi oleh investasi yang bergerak pada sektor eksplorasi sumber daya alam yang terbarukan. Data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2014 mencapai US\$ 2,15 miliar untuk dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 12,98 triliun.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pelaksanaan **Prioritas Pembangunan 6**; Transformasi Ekonomi, dapat disampaikan sebagai berikut :

- Percepatan pengembangan kawasan-kawasan industri yang diarahkan pada penciptaan nilai tambah produk unggulan pada kawasan-kawasan strategis, seperti : Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, Kawasan Industri Gas dan Kondensat Bontang, Kawasan Industri Pertanian PPU dan Paser, Kawasan Industri Pertanian Kukar dan Kubar, dan Kawasan Industri Agropolitan Kutai Timur.
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang berbasiskan Sumber Daya Alam terbarukan
- Membangun pola jaringan kerja antar perusahaan besar dengan Industri Kecil Menengah yang berbasis produk-produk unggulan daerah
- Reformasi birokrasi perizinan investasi melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk semua jenis usaha, Kerjasama di

Bidang Investasi, dan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah.

Selanjutnya, upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas telah sejalan dengan arah transformasi ekonomi. Peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah mencapai 7,96% di tahun 2014 dari sebelumnya sebesar 6,62% di tahun 2013 atau meningkat sebesar 1,34%. Hal ini berarti proses transformasi struktur ekonomi ke arah sumberdaya alam yang terbarukan telah sesuai dengan apa yang dicita-citakan pada visi Kaltim 2030. Walaupun disadari masih terkendala pada keterbatasan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung proses hilirisasi produk-produk unggulan non migas, seperti CPO, Karet dan produk pertanian tanaman pangan. Untuk itu diperlukan investasi pada sektor energi dan infrastruktur yang merupakan prasyarat utama dalam proses produksi hilirisasi produk-produk tersebut.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas dalam pembentukan PDRB, telah dilakukan melalui **Prioritas Pembangunan 7**; Pengembangan Agrobisnis, melalui kegiatan Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam dan Kopi, Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, Peningkatan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Terkait dengan upaya swasembada beras, capaian sasaran Peningkatan Produksi Pangan ditunjukkan oleh Rasio pemenuhan beras mencapai 67,46%, dengan produksi beras sebesar 271.417 ton dan tingkat konsumsi sebesar 402.366 ton beras.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan beras di Kalimantan Timur adalah rendahnya rata-rata produktivitas padi yang hanya mencapai 4,27 ton/ha, berkurangnya lahan akibat alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lainnya serta berkurangnya jumlah petani sawah dan tenaga penyuluh.

Berbagai upaya swasembada pangan telah dilakukan melalui **Prioritas Pembangunan 8**, Peningkatan Produksi Pangan, antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi, mekanisasi pertanian, pembangunan sarana prasarana pertanian dan penyuluhan pertanian tanaman pangan.
2. Pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM),
3. Pengembangan dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi
4. Pengembangan agribisnis peternakan (pembibitan dan budidaya)
5. Peningkatan dan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

Terkait dengan capaian **Prioritas Pembangunan 9**; Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Ramah Lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, ditunjukkan oleh persentase bauran energi baru terbarukan di tahun 2014 mencapai 0,5% dari target 0,62%. Namun tingkat pemenuhan kebutuhan listrik cukup menggembirakan, hal ini ditunjukkan oleh Rasio Elektrifikasi di Kaltim telah mencapai 69% sesuai target tahun 2014 dan dengan desa berlistrik 93% melampaui dari target yang direncanakan sebesar 88%. Kebijakan pemenuhan listrik di kawasan pedesaan, perbatasan dan daerah terpencil ditempuh dengan pengembangan energi baru terbarukan berdasarkan potensi masing-masing daerah serta pemenuhan jaringan listriknya.

Salah satu upaya yang telah ditempuh adalah dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) bekerja sama dengan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati. Hingga tahun 2014 telah ada 4 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah membangun PLTBG-POME dengan total daya yang dihasilkan sebesar 4,2 MW.



### **MISI KETIGA**

#### ***Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata***

Misi ketiga Kaltim Maju 2018 adalah Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata, dengan sasaran pembangunan infrastruktur yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar. Sesuai dengan target indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar yang telah ditetapkan sebesar 5,5 dengan kategori cukup. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) pada 10 Kabupaten/Kota tahun 2014 mencapai nilai 5,9 melebihi dari target dengan kategori cukup, meningkat dari tahun 2013 dengan nilai 5.

Pemerintah Provinsi terus berupaya dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas agar dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara merata, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.

Upaya pencapaian target Misi Ketiga ini diwujudkan melalui pencapaian ***Prioritas Pembangunan 10***; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, antara lain:

#### **Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan**

- Jalan Nasional kondisi mantap tahun 2014 mencapai 91,04 % dibandingkan tahun 2013 yang hanya 90,23 %, sedangkan Jalan Provinsi kondisi mantap tahun 2014 mencapai 52,20% meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya 50,01 %.
- Meningkatnya kapasitas jalan dengan daya mampu 10 Ton telah mencapai 48,2 Km di tahun 2014.
- Lanjutan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda yang terbagi menjadi Segmen Km.13 Balikpapan – Samboja dibiayai melalui APBD Provinsi yang saat ini dalam tahap pelaksanaan konstruksi, sedangkan Segmen Km.13 – Sepinggian Balikpapan didanai melalui APBN dan Loan

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang direncanakan kontrak November 2015. Selain itu untuk segmen II (Samboja-Palaran I) sepanjang 23 kilometer, segmen III (Samboja-Palaran II) sejauh 22,6 kilometer, dan segmen IV (Palaran-Jembatan Mahkota II) sepanjang 16,9 kilometer, juga telah ada MoU antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

- Untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendukung pengembangan kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, dibangun jalan akses menuju kawasan tersebut, demikian pula dengan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) dilaksanakan pembangunan jalan dan infrastruktur secara bertahap.
- Pembangunan Jembatan Pulau Balang dengan melanjutkan konstruksi bangunan pelengkung jembatan bentang pendek dengan progres mencapai 75,98% dan target tuntas pada tahun 2015. Untuk Jembatan bentang panjang dibiayai melalui dana APBN yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan saat ini dalam proses lelang MYC direncanakan kontrak bulan November 2015.
- Pembangunan transportasi dalam rangka membuka akses daerah-daerah terisolir di perbatasan dan pedalaman, dari 15 Kecamatan pada tahun 2013 yang belum terakses sarana transportasi darat, tahun 2014 melalui kerjasama TNI telah membuka akses transportasi darat untuk dua Kecamatan yaitu Long Bagun dan Long Pahangai, namun tetap perlu untuk ditingkatkan kualitasnya.

#### Bidang Prasarana Perhubungan

- Dalam rangka meningkatkan layanan transportasi udara, telah dikembangkan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan dengan luas gedung terminal 11.100 M<sup>2</sup> yang dilengkapi dengan 11 garbarata dan telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI Ke-6 DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Balikpapan.

- Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2014 dilakukan program pengamanan lalu lintas dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman baik pada ruas jalan nasional maupun jalan provinsi.
- Pembangunan Terminal Petikemas Kariangau telah beroperasi dan saat ini arus bongkar muat mencapai 183,899 Teus dari target rencana 129,192 Teus. Sedangkan dukungan air bersih telah terbangun 4 sumur dengan kapasitas 40 Liter per detik.
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2014 tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Untuk mendukung KEK tersebut telah dilaksanakan Pembangunan sarana pendukung Pelabuhan CPO Maloy sisi darat yaitu fasilitas perkantoran terdiri dari Gedung Workshop, pembangunan gedung kantor pengelola, masjid, Gedung PMK, pos jaga dan jalan akses lingkungan.
- Pembangunan Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung Samarinda telah terbangun gedung terminal penumpang seluas 14.000 m<sup>2</sup> dengan daya tampung 2,5 juta penumpang per tahun, sedangkan untuk pembangunan sisi udara melalui pola kontrak tahun jamak 2014-2018. Pada tahun 2014 telah dibangun konstruksi jalan servis peralatan dari sisi darat ke sisi udara atau sebaliknya, sepanjang 687 Meter dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2017.
- Pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau dalam rangka mendukung pariwisata dan menjaga kedaulatan NKRI telah dilakukan konstruksi aspal pada landas pacu sepanjang 1.200 x 30 meter dan ditargetkan selesai pembangunannya di tahun 2015.
- Pembangunan bandara perbatasan Datah Dawai, Long Bawan, dan Long Ampung untuk meningkatkan akses transportasi kawasan perbatasan. Telah dilakukan perpanjangan landas pacu bandara Datah Dawai 1.600 x

30 Meter, Bandara Long Bawan sepanjang 1.600 x 30 Meter dan Bandara Long Ampung sepanjang 1.200 x 30 Meter.

#### Bidang Prasarana Sumber Daya Air

- Pembangunan prasarana sumber daya air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan pembangunan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku Embung Muru sebesar 15 liter per detik, Bendung Siti 10 liter per detik, Bendung Lombok 10 liter per detik, Sumur di Kariangau 40 liter per detik dan pos hidrologi telah beroperasi, namun perlu dilakukan optimalisasi.
- Bendungan Sungai Wain kapasitas 140 liter per detik direncanakan akan memenuhi kebutuhan air baku Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung serta masyarakat Kota Balikpapan, saat ini masih dalam tahap pembangunan bangunan utama dengan progres capaian 40 % dan untuk memenuhi air bersih telah terbangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) 2x 25 liter per detik di Kariangau.
- Pada Sistem Sekerat dibangun dalam rangka menyuplai air baku Kawasan Ekonomi Khusus Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) dengan kapasitas 500 liter per detik, saat ini terbangun saluran pengambil dan pengolahan serta akan dilanjutkan untuk membangun pipa transmisi sepanjang 1,2 Km dari 24,2 Km dari saluran pengambil.
- Dalam upaya mengurangi banjir di Kota Samarinda dan pengendalian daya rusak air, dilakukan normalisasi dan perkuatan tebing sepanjang 16.222 meter pada Sistem Karang Asam Kecil, Sistem Karang Asam Besar, Sistem Karangmumus, Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam, serta dibangun Bendali di jalan H.M. Ardans.

#### Bidang Cipta Karya dan Permukiman

- Pembangunan Convention Hall yang dibangun melalui MYC 2011-2013 telah selesai terdiri dari bangunan gedung, arsitektur bagian Eksterior Gedung dan sebagian pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. Untuk penyempurnaan serta melengkapi bangunan utama, akan dilanjutkan

penyelesaian Taman, Parkir, Interior dan Mebeulair sehingga tahun 2015 dapat dimanfaatkan sebagai gedung yang representatif.

- Untuk cakupan layanan air minum, sampai dengan tahun 2014 sudah mampu melayani masyarakat Kalimantan Timur sebesar 50% dari target yang ditetapkan 38%.

#### **MISI KEEMPAT**

##### ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik***

Misi keempat Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan 3 (tiga) sasaran; 1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN; 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 3) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.

Capaian sasaran pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dilihat pada indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 4,9 pada tahun 2014 dari target 5,2. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2013, sementara opini BPK untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 akan diterbitkan pada tahun 2015.

Capaian sasaran kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 72,16 dari target 70 pada tahun 2014. Dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh penghargaan Peringkat Ketiga Terbaik Nasional dalam Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik RI.

Capaian sasaran ketiga, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja mencapai 70,97 dengan predikat B+ pada tahun 2014 dari target 72,00. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 memperoleh penghargaan Peringkat Ketiga Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2013. Pemerintah Provinsi bertekad akan terus meningkatkan kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.

Pelaksanaan Demokrasi Kalimantan Timur berjalan baik, ditunjukkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mencapai 68,13 dari target 66,37. Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan fungsi lembaga demokrasi dalam kehidupan demokrasi di masyarakat.

Upaya pencapaian target Misi Keempat ini melalui pencapaian **Prioritas Pembangunan 11**; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, antara lain :

1. Pembinaan Karir PNS, bantuan tugas belajar dan ikatan dinas,
2. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi,
3. Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
4. Pembinaan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Perimbangan Kepada Kabupaten /Kota,
5. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
6. Peningkatan Pelayanan Publik,
7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
8. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat,
9. Pendidikan Politik Masyarakat,
10. Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi,
11. Pengembangan Sistem Informasi dan Publikasi Data.

## **MISI KELIMA**

***Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim***

Misi kelima Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Serta Berperspektif Perubahan Iklim, dengan tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan dengan sasaran (1) Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan, (2) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Upaya pencapaian target Misi Kelima ini dilaksanakan melalui pencapaian ***Prioritas Pembangunan 12***; Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Rehabilitasi berupa : Penanaman 1 Juta Batang Bibit, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Hutan Mangrove dan rehabilitasi DAS prioritas seluas 11.160 ha.
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, melalui : Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pelestarian Alam, serta Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Moratorium penerbitan izin tambang dan lahan gambut melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Penundaan ijin pertambangan;
5. Pemanfaatan 100.000 Ha lahan terdegradasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat non sawit.
6. Penurunan emisi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga gas berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) yang hingga saat ini mampu menurunkan emisi sebesar 90.833 ton CO<sub>2</sub>eq.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun sasaran meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 75,24,

masih belum mencapai target tahun 2014 sebesar 78,29. Permasalahan utama adalah rendahnya tutupan lahan akibat pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan.

Sementara laju deforestasi 41.817 ha/tahun yang lebih tinggi dari kemampuan kita untuk melakukan rehabilitasi lahan menyebabkan Kalimantan Timur merupakan provinsi penyumbang emisi gas rumah kaca ke 4 terbesar dari 34 provinsi di Indonesia dengan rata rata 52,8 juta ton CO<sub>2</sub> equivalen/tahun. Sebesar 73% emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Kalimantan Timur adalah berasal dari perubahan hutan dan lahan untuk pemanfaatan lain. Saat ini elastisitas emisi Kalimantan Timur mencapai 1.611 ton CO<sub>2</sub> equivalen/Juta USD PDRB. Angka ini belum mencapai target tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 1.498 ton CO<sub>2</sub> equivalen/Juta USD PDRB.

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Hadirin yang berbahagia,***

Demikian penjelasan terhadap upaya pencapaian sasaran lima misi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalimantan Timur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka menuntaskan target sasaran sampai dengan akhir tahun 2018, antara lain :

1. Kapasitas Fiskal Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi dari dana perimbangan yang selama ini mengalami ketidakpastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah;
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada daerah;
3. Kewenangan Pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan eksploitasi sumber daya alam tidak berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur;
4. Kurangnya peran aktif Kabupaten/Kota dan Masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan;



5. Belum terintegrasinya program dan kegiatan baik antar sektor maupun antar pelaku pembangunan.

***Sidang Dewan Yang terhormat,***

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan **BAGIAN KEEMPAT**, terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

**1. Tugas Pembantuan yang diterima melalui APBN**

Pada tahun 2014 alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN sebesar Rp 215,74 Milyar, sementara tahun anggaran 2013 sebesar Rp 333,94 Milyar atau menurun 35,40 % akibat terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mencapai realisasi sebesar Rp 177,67 Milyar atau 82,35%, yang bersumber dari 10 (Sepuluh) kementerian/lembaga. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana (penerima) Tugas Pembantuan di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 meliputi 7 SKPD dan pelaksana tugas pembantuan di tingkat Kabupaten/Kota meliputi 46 SKPD.

Hasil penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional berupa; Pemeliharaan rutin jalan, Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan.
- b. Peningkatan produktivitas Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan, antara lain :
  - Peningkatan produksi tanaman pangan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal dan Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan.

- Pengembangan kebun benih tanaman rempah dan penyegar, Revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet), Pengembangan kebun benih tanaman tahunan, Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan untuk komoditi lada dan karet.
- Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya local berupa; pengembangan budidaya ternak sapi potong, kerbau, kambing/domba, unggas, dan babi; penguatan kelembagaan pelayanan inseminasi (IB); Pengembangan pakan ternak melalui optimalisasi integrasi tanaman-ruminansia, optimalisasi sumber bibit/benih (HPT), pengembangan lumbung pakan (LP) ruminansia, penguatan sumber bibit/benih hijauan pakan ternak, penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas; Penguatan pembibitan ternak, Fasilitas peralatan laboratorium KESMAVET dan penataan kios daging.
- Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian meliputi; Optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik; Pengembangan unit usaha pengolahan/penggilingan hasil tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.
- Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian meliputi cetak Sawah, jaringan Irigasi, pengembangan Optimasi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta intensifikasi.
- Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui kegiatan pengembangan sistem perbenihan ikan dengan mutu terjamin; pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan; pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri; pembinaan pengolahan hasil perikanan;

pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Paser.

- c. Pengembangan kawasan transmigrasi, melalui kegiatan; fasilitasi penempatan transmigrasi di wilayah strategis; penyediaan tanah transmigrasi di Kabupaten Bulungan; pengembangan lahan usaha produktif di kawasan transmigrasi; pengembangan kewirausahaan di kawasan transmigrasi; Bantuan pangan untuk 1.480 keluarga; Bantuan kesehatan untuk 2.775 kk; Pengembangan permukiman transmigrasi mandiri.
- d. Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi warga Komunitas Adat Terpencil, melalui kegiatan; pembangunan Rumah layak huni, bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan.

Hasil penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penataan administrasi kependudukan, melalui kegiatan: pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.
- b. peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan melalui kegiatan; Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas aneka kacang dan umbi di Kabupaten Kutai Barat dan Berau; Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal di Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda; Pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten Kutai Timur, Berau dan Paser; Pengembangan kawasan tanaman florikultura di Kota Samarinda; Pengembangan kawasan tanaman obat di Kabupaten Paser dan Kota Samarinda; Pengembangan kawasan tanaman sayuran di Kabupaten Paser dan Kota Samarinda; Sarana prasarana budidaya dan pascapanen di Kota Samarinda.

- c. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, melalui kegiatan Pengembangan tanaman karet di Kabupaten Kutai Barat.
- d. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian kehutanan melalui kegiatan; Area demonstrasi REDD di Kabupaten Berau.
- e. Peningkatan Produksi Perikanan melalui kegiatan; Pembangunan Kapal Perikanan 10 - 30 GT di Kabupaten Berau dan Paser; pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Kutai Timur; pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
- f. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia di Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, dan Kutai Timur; Pengadaan Ambulans dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 175 puskesmas di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- g. Pengembangan kawasan transmigrasi, melalui kegiatan; pembangunan permukiman dan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Kutai Timur; pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui Padat karya infrastruktur untuk 792 pengangguran di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang; bantuan pengembangan usaha ekonomi untuk 200 keluarga transmigran, bantuan kesehatan untuk 1.000 orang keluarga transmigran.
- h. Pengembangan destinasi pariwisata, melalui kegiatan; Fasilitasi/pendukung amenities/fasilitas pariwisata di Kabupaten Berau:
- i. Pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **2. Tugas Umum Pemerintahan**

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi; 1) Kerjasama antar daerah; 2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga; 3) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4) Pembinaan batas wilayah; 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana; 6) Pengelolaan kawasan; dan 7) Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Pelaksanaan kerjasama antar daerah telah menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama antara lain :

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Perbibitan, Budidaya Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur di Bidang Pencapaian Kaltim sehat dan MDG's untuk Mewujudkan Kaltim Maju 2018 yang menghasilkan Kesepakatan Bersama.

Pelaksanaan Kerjasama daerah dengan pihak ketiga telah menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama antara lain :

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasikan Kesepakatan Bersama.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Gajah Mada di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah telah menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama antara lain :

- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Angkatan Darat di Bidang Lanjutan Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui “Operasi Bhakti Kartika Jaya” yang menghasilkan Kesepakatan Bersama.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman di Bidang Pertanian dalam arti luas, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah perbatasan.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi terkait Informasi Geospasial yang menghasilkan Kesepakatan Bersama.
- Kerjasama Pembangunan Daerah antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pembangunan, Pengelolaan, Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana Bandar Udara Samarinda Baru di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama.
- Kesepakatan antara Gubernur dengan Menteri Dalam Negeri tentang Aksi PPK Tahun 2014 dan ditanda tangani pada tanggal 4 April 2014.

Pembinaan batas Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur meliputi 10 Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 833 Desa sampai dengan tahun 2014 telah dicapai kesepakatan antara lain :

1. Batas kartometrik antara Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Barat sepanjang  $\pm 142,3$  Km sehingga tidak ada permasalahan batas lagi dengan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Batas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang  $\pm$  639,81 Km.
3. Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sepanjang  $\pm$  800 Km.
4. Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 171 PBU.
5. Pemasangan Tugu Nama Pulau (TNP) sebanyak 19 TNP.
6. Pembakuan Nama Rupabumi terhadap nama rupabumi unsur alami Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 1.303 unsur alami.
7. Batas Wilayah antara Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan melalui Permendagri No. 46 tanggal 18 Juni 2014.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), pemetaan daerah rawan bencana, kapasitas, kerentanan dan risiko bencana, serta pemasangan sistem peringatan dini.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan kawasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencanangkan 8 (delapan) kawasan khusus yang akan ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 sebagai upaya percepatan transformasi ekonomi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan yang diarahkan untuk bergerak di sektor pengembangan aneka industri. Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan tersebut, Pemerintah Provinsi telah berupaya membangun infrastruktur dasar berupa; Pembangunan Jalan Akses KM. 13 Pelabuhan Kariangau; Pembangunan PLTU 2 x 25 MW dan Powerplant PLTU Kariangau 2 x 110 MW; Pembangunan Waduk Sungai Wain; Pembangunan Jalan

Akses dan Jembatan Pulau Balang; Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda.

2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda yang diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan tersebut, Pemerintah Provinsi telah berupaya membangun infrastruktur dasar berupa; Pembangunan Jalan Samarinda (TPK Palaran) – Sangasanga; Pembangunan Outer Ring Road Bandar Udara Samarinda Baru; Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam; Pembangunan Jalan outer Ring Road III Samarinda; Pembangunan Convention Hall di Kota Samarinda.
3. Kawasan Industri Gas dan Kondensat di Kota Bontang yang diarahkan untuk bergerak pada industri migas dan kondensat. Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan tersebut, Pemerintah Provinsi telah berupaya membangun infrastruktur dasar berupa Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang dan pembangunan Bandara Kota Bontang.
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur yang diarahkan bagi pengembangan industri hulu dan hilir kelapa sawit. Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan tersebut, Pemerintah Provinsi telah berupaya membangun infrastruktur dasar berupa; Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Maloy; Pembangunan Jalan dalam Kawasan Maloy; Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendung Kaliorang dan Bendungan Sekerat.
5. Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau yang diarahkan bagi pengembangan Industri Pariwisata. Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan tersebut, Pemerintah Provinsi telah berupaya membangun infrastruktur dasar berupa Pembangunan Bandara Maratua.



6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan bagi pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan tersebut, Pemerintah Provinsi telah berupaya membangun infrastruktur dasar berupa: Rehabilitasi Jalan Tanah Grogot – Pondong; Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai berupa Bangunan pengaman pantai pejala, Bangunan pengamanan Pantai Tanjung Tengah Kab. Penajam Paser Utara; Penanganan DAS Kritis DAS Kandilo.
7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat diarahkan bagi pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan tersebut, Pemerintah Provinsi telah berupaya membangun infrastruktur dasar berupa Pembangunan Bendungan dan jaringan irigasi Marangkayu serta daerah irigasi Sei Buluh.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sepanjang tahun 2014, antara lain :

- Penanganan perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana/ pemadaman kebakaran, bencana tanah longsor, evakuasi korban kecelakaan air.
- Penanganan unjuk rasa.
- Pengawasan, pengamanan dan penertiban aset dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam peningkatan disiplin aparaturnya/PNS.
- Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli (TURJAWALI).

***Sidang Dewan Yang terhormat,***

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan, kemudian sepenuhnya saya serahkan kepada Dewan yang terhormat untuk memberikan tanggapan dalam upaya perbaikan kinerja pemerintah.

Mengakhiri penjelasan ini, iijinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat serta para hadirin semua, atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti penyampaian ***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2014 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014.***

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya bagi kita sekalian, terutama untuk kemuliaan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

***Wabillahi Taufik Wal Hidayah  
Wassalamualaikum wr. wb.***

Samarinda, Juni 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**